

## RELEVANSI BUDAYA PATRIARKI DENGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR

Kartini Kharisma Nur<sup>1</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Ihyani Malik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Universitas Muhammadiyah Makassar  
e-mail : kartininur@gmail.com

---

### Abstract

*This study purposed to analyze the relevance of patriarchal culture with government bureaucracy. This study used qualitative by using direct interviews with related informants and this study used descriptive qualitative, namely providing an overview based on phenomena and facts that occurred. The results of this study showed there was a relevance of patriarchal culture with the government bureaucracy at the Makassar City Transportation Service which in essence patriarchy meant that the highest power was in men. This was evident in the ideology based on the dominant temperament, which was male employees who occupied the most structural positions. But for patriarchal ideology based on sex roles and status, women were essentially also able to enter the world of bureaucracy. Women were no longer a domestic service or household work but also they were able to become women career to survive their live, and their political status could also complete with men according to their hierarchical structure and career path without distinguishing gender, race, and religion.*

**Keywords :** Patriarchal Culture, Government Bureaucracy

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis relevansi budaya patriarki dengan birokrasi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan informan yang terkait dan tipe penelitian ini deskriptif kualitatif yakni memberikan suatu gambaran berdasarkan fenomena dan kenyataan yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan ada relevansi budaya patriarki dengan birokrasi pemerintahan di Dinas Perhubungan Kota Makassar yang pada hakikatnya patriarki berarti kekuasaan tertinggi ada pada laki-laki. Hal ini terbukti dalam ideology berdasarkan *temperament* yang dominan adalah pegawai laki-laki yang menduduki jabatan structural terbanyak. Tetapi untuk ideology patriarki berdasarkan *sex role* dan *status* pada hakikatnya perempuan juga mampu untuk terjun ke dunia birokrasi. Perempuan bukan lagi menjadi *domestic service* atau pekerjaan rumah tangga saja tapi juga mampu menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah dan status politisnya juga dapat bersaing dengan kaum laki-laki sesuai dengan struktur hierarki dan jenjang kariernya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan agama.

**Kata Kunci :** Budaya Patriarki, Birokrasi Pemerintahan

---

### 1. PENDAHULUAN

Budaya yang berkembang dalam masyarakat masih menganggap kaum perempuan tidak layak dan tidak patut untuk berada di sektor publik. Pada hakikatnya setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama

di mata hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, kedudukan, jenis kelamin, dan golongan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1). Budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, adat istiadat, moral, kepercayaan yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya merupakan

konteks dimana manusia berelasi satu sama lain yang mengatur relasi tersebut untuk saling menopang, bergotong royong, bekerja sama sehingga menghasilkan suatu system dengan penuh cinta kasih serta menjadikannya tatanan nilai atau adat istiadat dalam kehidupannya. Awal pembentukan budaya patriarki ditandai dengan perbedaan biologis yang dimana perempuan tidak memiliki otot sehingga menempatnya pada posisi yang lemah.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti melihat masih banyaknya pegawai laki-laki yang menempati jabatan struktural daripada perempuan dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki dan pada operasi lalu lintas kebanyakan petugas laki-laki yang diturunkan untuk mengawasi dan mengendalikan lalu lintas. Pegawai perempuan banyak ditempatkan pada bagian keuangan, umum dan kepengawaaian serta bidang sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini dikuatkan dengan melihat struktur organisasi dimana semua yang menempati jabatan penting diisi oleh laki-laki, hanya 6 orang pegawai perempuan yang menduduki jabatan structural. Jumlah keseluruhan pegawai yaitu 93 orang ASN yang dimana pegawai perempuan berjumlah 21 orang dan jumlah pegawai laki-laki berjumlah 72. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya pegawai laki-laki yang mendominasi di Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungannya, selaras dengan. Menurut (Sukmadinata, 2007) Relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi

internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan relevansi merupakan hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dan istimewa dari pada perempuan (Kollo, 2017). Weber mendefinisikan patriarki sebagai sistem kekuasaan yang dimana kaum laki-laki mengatur dan mengendalikan masyarakat dengan posisi sebagai kepala rumah tangga bahkan kaum laki-laki muda juga yang belum menjadi kepala rumah tangga dianggap lebih penting daripada kaum perempuan (Setiawan, 2016). Patriarki berasal dari kata patriarkat yang artinya struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan kehidupan pernikahan.

Patriarki merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu sosial terutama dalam Antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan anatar laki-lakidan perempuan yang dimana laki-laki memiliki keunggulan dari aspek penentuan garis keturunan, hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja seksual (Sakina, 2017).

Awal pembentukan budaya patriarki ditandai dengan perbedaan biologis yang dimana perempuan tidak memiliki otot sehingga menempatnya pada posisi yang lemah. Menurut (Wardani, 2009), ideologi patriarki disosialisasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, *temperament*, merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasar pada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. Hal itu memberikan kategori *stereotype* kepada laki-laki dan perempuan; seperti kuat, cerdas, agresif, efektif merupakan sifat yang melekat pada laki-laki, sedangkan tunduk (*submissive*), bodoh (*ignorant*), baik (*virtuous*), dan tidak efektif merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Kedua, *sex role*, merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gesture dan sikap pada setiap jenis kelamin. Sehingga terjadi pelekatan *stereotype* pada perempuan sebagai pekerja domestik (*domestic service*) dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Ketiga, status yang merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status *superior* dan perempuan *inferior*.

Ideologi patriarki ini sangat sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Stereotip yang melekat pada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak menghasilkan uang dari kerjanya mengurus pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan domestik ini dianggap remeh dan menjadi kewajibannya perempuan. Ideology patriarki tidak mudah untuk diruntuhkan karena dapa dasarnya secara ekonomi perempuan bergantung kepada laki-laki. secara

konvensional laki-laki merupakan sumber utama dalam keluarga sedangkan perempuan merupakan pengurus rumah tangga. Laki-laki bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah dan melakukan semua pekerjaan rumah.

Menurut (Omara, 2004) ada dua bentuk patriarki yaitu patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik mengarah pada pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk *stereotype* yang melekat pada perempuan dan kodrati sehingga sering terjadi penindasan pada kaum perempuan. Sedangkan patriarki publik mengarah kepada struktur masyarakat yang dimaksudkan sebagai berikut: 1) relasi patriarki rumah tangga, 2) relasi patriarki dalam pekerjaan, 3) relasi dalam berbangsa dan bernegara, 4) kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, 5) relasi dalam seksualitas, dan 6) saling berkaitan dan mendominasi laki-laki atas perempuan.

Kemudian (Murniati, 2004) mendefinisikan patriarki sebagai suatu system yang dimana laki-laki berkuasa untuk menentukan sesuatu yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang perempuan. Kelemahan-kelemahan perempuan akibat budaya patriarki, yaitu: 1) Perempuan kurang menyadari dirinya juga memiliki hak-hak asasi manusia yang sama, 2) Perempuan selalu merasa malu dan merasa takut 3) Perempuan kurang mampu berpikir secara logis sehingga tidak dapat mengambil suatu keputusan 4) Perempuan memiliki beban kerja domestik 5) Perempuan selalu mempertimbangkan tradisi turun temurun yang ada dalam keluarga 6) Perempuan selalu mempertimbangkan factor agama 7)

Perempuan selalu mempertimbangkan factor ekonomi 8) Perempuan kurang bisa menerima kekuasaan dan tidak mampu merembut kekuasaan kebiasaan mengalah. 9) Perempuan kurang mampu mengendalikan emosinya sehingga mudah dipengaruhi. 10) Perempuan kurang mampu menjalin kerjasama sehingga sulit mengatukan pandangan

Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di dalam wilayah politik dan pemerintahan. Kendala yang biasa dihadapi perempuan yaitu berupa peran, tanggungjawab domestic, status subordinasi dalam hubungan gender serta perilaku sosial yang bersifat patriarkis. Perempuan kurang siap dalam menjalankan peran publiknya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut walby, menjelaskan bahwasanya patriarki adalah system yang menempatkan laki-laki sebagai posisi yang dominan, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Kemudian ia membedakan patriarki menjadi patriarki privat dan patriarki public. Keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Pertama dalam hubungan antara struktur, dan yang kedua dalam bentuk institusi dari masing-masing struktur. Keduanya dibedakan dalam bentuk utama dari strategi patriarkal exclusionary “pengecualian” dalam patriarki privat dan segregationist “pemisahan” dalam patriarki public. Patriarki privat didasari oleh produksi rumah tangga, suami/bapak yang mengontrol perempuan secara langsung dalam wilayah privat rumah tangga. Sedangkan patriarki public didasari oleh struktur selain rumah tangga yaitu didalam instansi pemerintahan.

Birokrasi adalah pengorganisasian pekerjaan yang teratur yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi artinya jumlah pekerjaan yang banyak yang dikelola dan dilaksanakan oleh banyak orang secara efisien dan efektif. Pekerjaan yang dimaksudkan tidak tumpang tindih, tidak memakan biaya tinggi, tidak berbelit-belit, rasional, dan proporsional (Risnawan, 2017). Kemudian (Anggara, 2015) mengemukakan bahwa birokrasi adalah lembaga yang mampu meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial sebagai instrument administrasi yang rasional dalam skala besar. Sedangkan birokrasi pemerintahan merupakan struktur tertentu yang memiliki hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi yang mengakibatkan perbedaan antara wewenang dan tugas antar anggota organisasi. Birokrasi pemerintahan dianggap sebagai struktur organisasi yang tidak sekedar pendekatan secara administratif tetapi juga pada aspek politik, budaya, sosial, dan ekonomi sebagai pemberi layanan yang baik bagi masyarakat (Ndraha, 2003).

Menurut (Ramadhanti, 2018) mengemukakan ada empat macam pengertian birokrasi, yaitu: 1) Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat oleh para penguasa untuk menjalankan pemerintahan 2) Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah yang buruk 3) Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi 4) Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka

mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan

Ciri-ciri birokrasi menurut (Risnawan, 2017), yaitu: 1) Jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hirarkis 2) Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri 3) Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian 4) Pengawai menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya 5) Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pengawai negeri sipil 6) Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri 7) Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan 8) Promosi berdasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata

Konsep birokrasi rasional sebagai mana dikemukakan oleh Max Weber dimaksudkan untuk birokrasi bekerja secara objektif. Dengan adanya birokrasi yang rasional diharapkan para aparat birokrasi dapat bekerja secara professional sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tetapi dalam perakteknya masih banyak kekurangan dan kelebihan maka dari itu menurut (Adnan, 2013) ada empat yaitu: 1) Formalisasi aturan dan prosedur, yaitu dasar bagi pengambilan keputusan seorang pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan yang adil dan cepat guna mengetahui hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan. Tetapi jika ditetapkan secara kaku akan menimbulkan hambatan terhadap perubahan dan inovasi dalam kehidupan birokrasi public. 2) Hirarki yang panjang, yaitu pejabat birokrasi melakukan kordinasi sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara

sinergis. Tetapi hal ini mengakibatkan seorang pejabat birokrasi memiliki satu atasan karena itu penilaian kinerja bawahan sangat bergantung kepada atasannya dan juga menimbulkan proses pengambilan keputusan dalam birokrasi terkotak-kotak (*fragmented*) karena arus informasi dan perintah hanya berlangsung secara vertical sehingga hirarki juga mengakibatkan distorsi dalam komunikasi. 3) Spesialisasi kerja, yaitu meningkatkan efisiensi organisasi guna menyederhankan proses administrasi serta dapat mengembangkan keahlian birokrat sebagai pengembangan profesionalisme dalam bekerja. Tetapi dapat juga menimbulkan sifat individualisme karena seorang aparat birokrasi hanya akan berfokus pada tugas dan tanggungjawabnya sendiri serta tidak peduli dengan tugas kolega lain, akibatnya kepentingan dan misi organisasi dapat terabaikan. 4) Impersonalitas, yaitu mendorong pejabat birokrasi untuk bertindak adil dan bersikap objektif serta netral dalam memberikan pelayanan publik. Tetapi jika dilakukan secara kaku maka akan mengakibatkan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat penting dalam mengelola kegiatan birokrasi. Birokrasi pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa setiap warga negara mempunyai akses yang berbeda-beda terhadap keberadaan birokrasi dan pelayanan public.

Menurut (Mustafa, 2003), terdapat empat fungsi birokrasi pemerintahan, yaitu: 1) Administrasi, pengimplementasian undang-undang yang telah disusun dan ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. 2) Pelayanan, melayani masyarakat maupun kelompok-

kelompok tertentu. 3) Regulasi, dirancang dan ditetapkan untuk mensejahterahkan masyarakat umum. Pada dasarnya badan birokrasi dihadapkan anatar dua pilihan yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. 4) Pengumpulan informasi, informasi tentang efektivitas dan efisiensi dalam membuat kebijakan yang baru sesuai dengan kondisi yang faktual dalam masyarakat.

## 1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif yakni memberikan suatu gambaran berdasarkan fenomena dan kenyataan yang terjadi, menganalisis serta mengobservasi sehingga mengetahui relevansi budaya patriarki dengan birokrasi pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan penelitian ini yakni menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pada strata, kedudukan ataupun wilayah tetapi berdasarkan tujuan yang tepat dan berkaitan dengan penelitian. Adapun jumlah informan penelitian sebanyak 6 orang kepala seksi. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data menjadi bagian yang penting dalam penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari kemudian

menyusun data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang sistematis. Berikut teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu 1) Reduksi Data, yakni memilih, memusatkan perhatian terhadap penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dan dicatat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 2) Penyajian Data, merupakan hasil dari reduksi data yang kemudian akan dijadikan gambaran peneliti secara menyeluruh. Menyajikan data secara menyeluruh ini sehingga memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang diteliti 3) Penarikan Kesimpulan, yakni melakukan perbandingan dan menghubungkan semua data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan dalam memecahkan masalah penelitian.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia dikenal sebagai penganut budaya patriarki. Dunia birokrasi yang menjadi agenda utama dalam wacana masyarakat telah memberikan warna pada tatanan pemerintahan di Indonesia khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi sekelompok orang khususnya perempuan yang ingin berkiprah di dalam birokrasi. Perempuan sebagai kaum yang dipresentasikan sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus pekerjaan rumah dan sebagai seorang istri serta seorang ibu telah dapat membuktikan kemampuannya dalam kegiatan birokrasi.

Sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu instansi atau organisasi dengan sebagaimana menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2021 yaitu jumlah keseluruhan mencapai 565 orang dengan rincian 93 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 472 orang pegawai kontrak (Non ASN).

Dalam lingkup birokrasi, perempuan masih dianggap sebagai pelengkap dalam relasi kerja dan masih laki-laki yang mendominasi. Hanya sedikit perempuan yang mampu untuk menjadi kandidat pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintahan bahkan untuk menjadi seorang pimpinan. Hal tersebut menjadi persoalan yang mengakomodasi program kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan. Ada beberapa fakta representasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan, yaitu: 1) Perempuan sulit untuk meraih posisi tertinggi karier birokrasi karena status perempuannya. Dalam tata pemerintahan local terutama didaerah sangat sulit atau bahkan mustahil perempuan mampu berkompetisi meraih jabatan puncak birokrasi. Penyebabnya karena kultur feodalisme dan patriarki yang masih melekat pada masyarakat. 2) Sekeras dan secemerlangnya karier perempuan masih tidak dianggap 'pas' dan ideal apabila menjadi sosok pemimpin dalam birokrasi. Stereotip gender menempatkan perempuan seolah tidak memiliki karakter yang kuat dan mempunyai sebagai pemimpin. Perempuan hanya diidealkan sebagai pelengkap yang mengurus persoalan administrasi. 3) Perempuan terhambat persoalan 'biologis' dan definisi

seksualitasnya. Karena konstruksi sosial menyebabkan waktu mereka sering tersita oleh problem domestic. Hal tersebut menjadi kendala meraih jenjang karier bagi seorang perempuan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka tuntutan peran yang harus dijalankan seorang perempuan mengalami perubahan pula. Dahulu perempuan sulit untuk mengaktualisasi dirinya karena adanya ikatan budaya yang ketat, maka budaya itu pun berubah sejalan dengan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat di Indonesia. Maka dari itu peneliti menganalisis adanya relevansi budaya patriarki dalam 3 ideologi dalam birokrasi pemerintahan, yaitu:

### **Budaya patriarki berdasarkan temperament**

Hal tersebut adalah komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian yang dimana ada yang dominan dan submissive pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar disini terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Budaya patriarki dalam ideology temperament atau kepribadian sesuai dengan psikologi tidak menuntut semua perempuan itu lemah, tunduk, patuh (*submissive*) tetapi perempuan juga bisa keras, berpengaruh, dan juga bertanggung jawab (*dominant*) dalam pekerjaannya sesuai dengan jabatannya. Kepribadian disini memang lebih dominan dimiliki oleh laki-laki yang kodratnya sejak lahir sebagai seorang pemimpin dan berkuasa atas perempuan. Tetapi dalam bidang birokrasi pemerintahan perempuan juga mampu untuk ikut serta walaupun masih terbatas oleh system patriarki yang

menempatkan perempuan dibawah laki-laki.

### **Budaya patriarki berdasarkan *sex role***

Hal tersebut adalah komponen sosiologis yang meliputi tingkah laku kedua jenis kelamin yang dimana ada yang breadwinner dan domestic service pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Budaya patriarki dalam ideology sex role perempuan ditempatkan untuk pekerjaan rumah tangga saja (*domestic service*) atau laki-laki sebagai pencari nafkah (*breadwinner*) tidak sesuai karena siapapun yang memiliki kemampuan, kemauan untuk terus berkembang dan berani untuk ikut dalam birokrasi pemerintahan dapat juga mencari nafkah dan ikut dalam mencapai jenjang karier yang cemerlang. Tetapi tidak dipungkiri juga keberaddan perempuan disini berperan ganda karena meski perempuan yang menduduki jabatan, tugas rumah tangga tidak bisa dikesampingkan, begitupula tanggungjawabnya di kantor.

### **Budaya patriarki berdasarkan status**

Budaya patriarki berdasarkan status yaitu perempuan disini dalam dunia birokrasi tidak lagi dianggap status politisnya sebagai inferior tetapi juga mampu menjadi pemimpin (*superior*) karena dengan berbagai kualifikasi keahlian yang dimilikinya dianggap mampu untuk masuk didunia birokrasi dan mampu memimpin anggota di bawahnya. Kualifikasi keahlian ini juga diimbangi dengan jenjang karier yang telah ia tempuh.

Budaya patriarki memang masih melekat dalam kehidupan bermasyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa

pemimpin suatu organisasi dipemerintahan masih diduduki oleh seorang laki-laki yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Makassar Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kepala Bidang semua diduduki oleh seorang laki-laki.

Dalam perkembangannya perempuan tidak lepas dari perjuangan kaum feminis sebagai penerus R.A Kartini yang membawa kesetaraan gender yang memberikan perempuan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, lapangan pekerjaan yang mengutamakan kuota 30% bagi kaum perempuan dalam perwakilan birokrasi pemerintahan. Keberadaan perempuan dalam birokrasi juga tidak lepas dari kewajibannya sebagai seorang ibu dan mengurus keluarganya dirumah. Perempuan mampu memimpin dalam birokrasi pemerintahan tetapi dalam urusan agama tetap laki-laki yang menjadi kepala dalam rumah tangganya yang merupakan kodrat dasarnya.

Perempuan dalam agama memang dikodratkan untuk mengurus anggota keluarganya serta sebagai guru bagi anak-anaknya yang kelak menjadi penerus bagi nusa dan bangsa. Perempuan sekarang ini tidak lagi terkurung dalam pekerjaan rumah saja tapi juga bisa keluar untuk bekerja serta menjadi tulang punggung keluarganya. Dalam masalah menjadi pemimpin dalam birokrasi pemerintahan, perempuan dapat menjalankannya. Tetapi dalam hal menjadi seorang pemimpin dalam rumah tidak boleh mengambil ahli peranan laki-laki sebagai kepala keluarga yang sudah menjadi kodratnya.

Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya perempuan tidak lagi terikat sebagai ibu rumah tangga saja tapi perempuan juga mampu berkarier dalam

dunia birokrasi. Birokrasi pemerintahan yang ideal disini dimaksudkan, yaitu: pertama, adanya pembagian kerja yang dimana pembagaian pekerjaan sesuai dengan keahlian ,jabatan, dan beban kerja. Kedua, adanya struktur hiraerkis yang jelas yang dimana pembeda antara atasan dan bawahan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ketiga, perinsip netral yang mengutamakan profesionalitas, dan penempatan karier mengikuti jenjang karier dan masa kerja.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai relevansi budaya patriarki dengan birokrasi pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kota Makassar berdasarkan 3 ideologi patriarki menurut Millet (Wardani, 2009), yaitu: berdasarkan temperament, berdasarkan sex role, dan berdasarkan status. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Budaya patriarki berdasarkan *temperament*, bahwa laki-laki lebih dominan dalam menjalan pekerjaan terkhusus pada bagian berlalu lintas atau untuk turun kejalan untuk mengawasi lalu lintas dan pekerjaan berat lainnya. Pada dasarnya tidak menuntut semua perempuan itu lemah, tunduk, patuh (*submissive*) tetapi perempuan juga bisa keras, berpengaruh, dan juga bertanggung jawab (*dominant*) dalam pekerjaanya sesuai dengan jabatannya. 2) Budaya patriarki berdasarkan *sex role*, bahwa laki-laki yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah tetapi perempuan juga mampu untuk menjadi tulang punggung dan mencari nafkah tanpa melupakan pekerjaanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal ini yang membuktikan juga bahwa perempuan tidak

selamanya menjadi *domestic service* atau sebagai ibu, isteri, dan melakukan semua pekerjaan rumah tetapi juga mampu untuk menduduki suatu jabatan. 3) Budaya patriarki berdasarkan *status*, bahwa status politis disini dapat diduduki oleh siapa pun itu tanpa memandang gender. *Inferior* yang selalu dikaitkan dengan perempuan yang selalu merasa rendah diri, tidak berkuasa, dan tidak mampu memimpin tidak selamanya benar karena perempuan sekarang ini sudah terjun ke dunia birokrasi dan menduduki suatu jabatan sesuai jenjang kariernya.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. F. (2013). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik*. 12(2).
- Anggara. (2015). *Perbandingan Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 320–318.
- Murniati. (2004). *Perempuan dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga*.
- Mustafa, D. (2003). *Birokrasi Pemerintahan*. CV. Alfabeta.
- Ndraha, T. (2003). *Kyibernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Omara, A. (2004). Perempuan, Budaya Patriarki, dan Representasi. *Mimbar Hukum*, 2(4), 148–165.

Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 96.

Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71.

Setiawan Ikwan. (2016). *PATRIARKI: Masyarakat, budaya, dan negara dalam kuasa lelaki*. Matatimoer Institute.

Sukmadinata. (2007). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Kesamaan Kedudukan Dalam Pemerintahan

Wardani, E. H. (2009). Belenggu-Belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison Dalam “the Bluest Eye.” *Fakultas Ilmu Budaya*, 1–45.

Wawan Risnawan. (2017). Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).